

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Adji Samekto. (2009). *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti
- Bambang Sunggono. (2002). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Boer Mauna. (2000). *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Eddy Pratomo. (2011). *Hukum Perjanjian Internasional, Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi*. Bandung: Pt Alumni
- Eko Riyadi. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia Prespektif Internasional, Regional dan Nasional*. Depok: Pt Raja Grafindo Persada
- J.G. Starke. (2010). *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kansil dan Christine Kansil. (2011). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Pt Rineka Cipta
- Keorniatmanto Soetoprawiri. (1996). *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Umum
- Koentjoroningrat. (1997). *Metode-metode Penelitian Masyarakat (edisi ketiga)*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Muchtar Kusumaatmaja dan Ety R. Agoes. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : PT Alumni

Ridwan Khairandy.(2011). *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. Yogyakarta: FH UII Press

Ronny Hanitijo Soemitro. (1982). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Soerjono Sokanto dan Sri Mahmudji. (2013). *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Suratman dan Philips Dillah. (2012). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta

Zainal Asikin. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Konvensi tentang Hak Anak 1989 (*Convention On The Rights Of The Child*)

Konvensi tentang Hak Sipil dan Politik 1966 (*Convention on Civil and Politic Right*)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (*Declaration Human Right*)

Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi

Rasial 1965 (*International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination*)

Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi

1979 (*Convention On Elimination Of All Forms Of Discrimination Againts Women*)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memproleh Kehilangan, Pembatalan, dan Memproleh Kembali Kewarga- negaraan

Republik Indonesia Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Kewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

### C. Ejournal

Daud M.Liando. (2016). *Ejurnal Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)*. Vol 3 Nomor 2 . Oktober.

Melda Kamil Ariadno. (2008). *Ejurnal Kedudukan Hukum Internasional dalam Status hukum nasional*. Vol 5 Tanggal 3 April 2008

Muktiono. (2009). *Ejurnal Penegakan Hak Atas Demokrasi Kelompok Rentan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia*. VOL II No 1 Tanggla 1Juni 2009

Titik TriwulanTutik. (2006). *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*. Prestasi Pustaka. Jakarta. Hlm 248. Dilihat dalam *Ejurnal Tinjauan Yuridis*

*Pelibatan Anak-Anak dalam Penyelenggara Pemilu.* oleh Rika Lestari. Vol II. 2009. Hlm 26.

#### **D. Internet**

<https://www.radioidola.com/2016/topic-of-the-day-menakar-plus-minus-wacana-pemberlakuan-dwikewarganegaraan/amp>. diakses pada tanggal 16 Februari 2019. Pukul 12.40 WIB

<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20160819104043-20-152397/sistem-dwikewarganegaraan-dinilai-bisa-ncan-kedaulatan-nkri>. diakses pada tanggal 16 Februari 2019 Pukul 17.21 WIB

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diakses pada tanggal 13 Maret 2019 Pukul 20.07 WIB

<https://dinpendukcapil.purbalinggakab.go.id/fungsi-dan-kegunaan-e-ktip/>. diakses pada tanggal 29 Juni 2019 Pukul 20.31 WIB

<https://referensi.elsam.or.id/2014/08/uu-ri-no-39-tahun-1999-tentang-hak-asasi-manusia/>. diakses pada tanggal 26 Juni 2019 Pukul 23.33 WIB

<https://www.kompasiana.com/rohlimohamad/55108d62813311583bbc6694/hak-pilik-warga-negara-sebagai-sarana-pelaksana-kedaulatan-rakyat-dalam-pemilu>. diakses pada tanggal 27 Juli 2019 Pukul 0. 12 WIB